

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Komisiner	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
N e r a c a	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 - 13



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/KM 1/2016

Laporan Auditor Independen

No : 00077/2.1079/AU.2/10/1060-1/1/4/2021

**Komisioner Pencipta dan Komisioner Hak Terkait
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, laporan Aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyedekahkan suatu basis bagi opini audit kami.



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/KM 1/2016

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Tubagus Manshur, S.E., Ak., M.Si., BKP., CA., CPA
No Reg Akuntan Publik AP. 1060

Jakarta, 23 April 2021

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

NERACA

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	20.398.119.576	14.722.390.459
Piutang royalti	5	9.101.133.975	12.979.264.424
Piutang lain-lain		903.535.949	-
Biaya dibayar dimuka		42.971.200	-
Pajak dibayar dimuka	10a	1.832.613.551	389.852.668
Jumlah aset lancar		32.278.374.251	28.091.507.551
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	6	31.608.985	4.271.402
Jumlah aset lancar		31.608.985	4.271.402
JUMLAH ASET		32.309.983.236	28.095.778.953
LIABILITAS DAN ASET BERSIH			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kewajiban kepada pemilik hak	7	21.907.702.896	23.216.228.806
Utang lain-lain	8	9.981.448.821	5.698.294.930
Beban akrual	9	102.739.708	462.500.000
Utang pajak	10b	184.030.908	179.997.907
Jumlah liabilitas jangka pendek		32.185.920.333	29.557.021.443
ASET BERSIH			
Tidak tenkat temporer		124.062.903	(1.451.242.490)
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		32.309.983.236	28.095.778.953

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 1 9</u>	<u>2 0 1 8</u>
PENERIMAAN DAN PENDAPATAN			
Jasa manajemen	11	7.488.967.140	3.827.407.370
Pendapatan jasa giro		389.460.013	333.923.603
Pendapatan lainnya		544.361.892	-
Jumlah pendapatan dan penerimaan		8.402.789.045	3.961.330.873
BEBAN			
Beban langsung	12	913.656.000	-
Beban operasional	13	5.711.661.212	3.441.100.175
Biaya meterai dan administrasi bank		103.788.834	80.063.474
Beban Lainnya		34.524.827	3.821.500
Jumlah beban		6.763.630.673	3.524.985.149
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH SEBELUM PAJAK		1.639.158.372	436.345.724
BEBAN (MANFAAT) PAJAK			
Pajak kini	10c	53.852.979	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH		1.585.305.393	436.345.724
ASET BERSIH AWAL TAHUN		(1.461.242.490)	(1.897.588.214)
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		124.062.903	(1.461.242.490)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan royalti	10.058.571.879	5.230.560.327
Pembayaran kepada pemilik hak dan pihak ketiga	(3.981.889.278)	(1.852.703.933)
Pembayaran kepada pengurus dan karyawan	(3.137.838.002)	(1.731.313.420)
Penerimaan bunga bank dan jasa giro	913.821.905	333.923.503
Pembayaran pajak	(1.535.552.061)	70.996.840
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	3.389.615.942	578.999.200
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>5.706.732.385</u>	<u>2.630.462.517</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(31.003.268)	(4.724.198)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(31.003.268)</u>	<u>(4.724.198,00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	<u>5.675.729.117</u>	<u>2.625.738.319</u>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>14.722.390.459</u>	<u>12.096.652.140</u>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>20.398.119.576</u>	<u>14.722.390.459</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah sebuah Lembaga Negara Bantu Eksekutif Non APBN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014, untuk mewakili pemilik lisensi atas hak cipta dan atau produk hak terkait dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial, kepada pemilik lisensi tersebut. Atas kegiatan tersebut LMKN mendapatkan imbalan berupa jasa manajemen.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang efektif berlaku sejak 16 Oktober 2014 mengatur tentang pemberian lisensi atas Hak Cipta dan atau Produk Hak Terkait kepada pengguna yang bersifat komersial dan pemberian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi satu ciptaan atau produk hak terkait tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial.

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Produser *Phonogram* dan *Performer* untuk kepentingan komersial.

Petunjuk teknis pelaksanaan proses pengelolaan royalti oleh LMKN diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2 OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan Musik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI 2 OT 03 01-01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Rumah Bernyanyi.

Anggaran dasar LMKN telah mengalami perubahan-perubahan terakhir dengan akta No.4 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Ny. Sastriani Josoprawiro, SH, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AH-27878.AH 01.02.1 tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 13 September 2013 Tambahan No 101327/2013.

LMKN berkedudukan di Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI, (Fks. Sentra Mulia) lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8, Jakarta Selatan 12940.

b. Susunan Komisiner

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.KI.01.08 TAHUN 2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan Komisiner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait Di Bidang Lagu Dan/Musik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan susunan komisiner LMKN untuk tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

2019

Ketua	: Brigjen Pol (P) Yurod Sa'ah SH, MH
Wakil Ketua	: Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Anggota	
A. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	: Ir James Freddy Sundah (Pencipta) Rasir Mudiardjo Kawradji SH, ACCS., S.Kom, CIP., CPL (Hak Terkait)

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Susunan Komisiner (lanjutan)

2019

B. Bidang Hukum dan Litigasi	Marulani Junias Hutahuruk SH (Pencipta) Rien Uthami Dewi SH (Hak Terkait)
C. Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik	Etiel G Ade (Pencipta) Irfan Aulia S.Kom (Hak Terkait)
D. Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi	Adi Adnan (Pencipta) Yessi Kumiewan ST (Hak Terkait)

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.KI.01.08 TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisiner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/Atau Musik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan susunan pelaksana tugas komisiner LMKN untuk tahun 2019 dan 2018 yaitu sebagai berikut.

2018

Ketua	James F Sundah
Wakil Ketua	Danan Purnomo SH., Ma.
Sekretaris	Dr. Dra. Emi Widyastari, Apt. MS.
Anggota	Dr. Imam Haryanto, Drs. SH., MH. Rapin Mudhiardjo, SH. ACCS Etiel G Ade Adi Adrian Raden Muhammad Samsudin Orjat Kusumah Yurod Saleh, SH., MH.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan LMKN sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia. Prinsip akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten di dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut.

a. Pernyataan Kepatuhan

Komisiner bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dasar pengukuran dalam penyajian laporan keuangan adalah biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam akun terkait. Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, disajikan dengan menggunakan dasar akuntansi akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dimasukkan sebagai setara kas. Kas terdiri atas kas tunai dan kas di bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Indonesia Rupiah (IDR). Jika tidak dinyatakan lain, semua angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dipasasi pencairannya.

d. Piutang Royalti

Piutang royalti disajikan sebesar jumlah neto royalti yang ditagihkan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian jangka panjang biaya dibayar di muka disajikan sebagai aset tidak lancar.

f. Aset Bersih Terikat Temporer

Neraca menyajikan masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang memuat dana.

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

f. Aset Bersih Terikat Temporer (lanjutan)

Aset bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Kewajiban Kepada Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkat

Dibagikan sebesar royalti atas distribusi (*distributed royalty*) kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkat.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan manajemen diakui sebesar 5% dari nilai tagihan ke pemakai hak, pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga bank yang berlaku sedangkan pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual.

Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*). Beban ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Beban bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku.

i. Perpajakan

LMKN mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, LMKN harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. LMKN belum mengakui adanya pajak tangguhan.

j. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 "Ketenagakerjaan" tanggal 25 Maret 2003, diluar program Pensiun Manfaat Pasti, LMKN berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi kepada karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK tersebut meliputi berhenti karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri secara terhormat. Besarnya kompensasi PHK ditentukan oleh sebab terjadinya PHK, jumlah masa kerja dan besarnya penghasilan tetap yang diterima karyawan pada bulan terakhir. Pada tahun 2019 dan 2018 LMKN belum membookkan kewajiban imbalan pasca kerja karena belum memiliki karyawan tetap.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP mewajibkan LMKN untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan berhubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI (Lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Estimasi dan asumsi

LMKN mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali LMKN. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan terhadap adanya penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan berikutnya, diungkapkan di bawah ini.

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan LMKN. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan LMKN melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terdapat ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi dan posisi pajak LMKN dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang atau jasa, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, beban modal dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas		
Rupiah	<u>13.531.489</u>	<u>15.407.313</u>
Bank		
Rekening giro Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<u>20.384.568.067</u>	<u>14.706.983.146</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>20.398.119.576</u>	<u>14.722.390.459</u>

Se seluruh saldo bank milik LMKN ditempatkan pada bank BUMN dan tidak dibatasi penggunaannya.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG ROYALTI

	2019	2018
PT Indomarco Prismaatama	1.186.813.072	1.077.003.585
PT Cakrawala Andalas Televisi	1.144.947.490	1.462.472.880
PT Imperium Happy Puppy	378.430.200	226.450.200
PT Delamibrands Kharisma Busana	328.950.805	-
PT Vizta Mitra Indonesia	252.240.000	-
PT Putera Malarain Mitra Sejahtera	175.484.790	175.274.790
Venus Karaoke	167.189.350	154.769.200
PT Mitra Suarasejati	160.383.150	152.097.750
CV Limas Hotel	152.773.200	-
PT Net Mediatama Televisi	152.049.521	253.716.120
PT Bakti Jaya Perkasa	140.590.000	-
PT Lima Pilar: Jaya Abadi	127.089.600	127.339.200
Persek Wahana Musik Indonesia	120.000.000	-
PT Tumbuh Sehat Makmur	104.658.000	-
PT Duta Nada Mas Prima	102.408.200	-
Ade Widagdo	-	113.736.150
CV Anugraha Karya Berlian	-	105.440.400
PT Agung Wahana Indonesia	-	161.838.000
PT Bakti Jaya Perkasa	-	104.839.800
PT Bercindo Bersamajaya	-	101.047.500
PT Duta Visua: Nusantara Tivi Tujuh	-	369.341.625
PT Graha Layar Prima	-	244.555.200
PT Televisi Transformasi Indonesia	-	345.518.547
Lain-lain (di bawah 100.000.000)	4.407.155.597	7.804.124.437
Jumlah piutang royalti	9.101.133.975	12.979.264.424

Merupakan saldo tagihan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait.

6. ASET TETAP

	2019		
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan
Harga Perolehan :			
Peralatan kantor	4.724.198	31.003.268	-
Akumulasi Penyusutan :			
Peralatan kantor	452.796	3.665.685	-
Nilai Buku	4.271.402		31.608.985

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

6. ASET TETAP (Lanjutan)

	2018			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan :				
Peralatan kantor	-	4.724.198	-	4.724.198
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan kantor	-	452.796	-	452.796
Nilai Buku	-			4.271.402

7. KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG DAN PEMILIK HAK

	2019	2018
Royalti	15.017.239.977	18.382.842.693
Sentra Lisensi Musik Indonesia	3.232.488.457	2.965.679.046
Hak Pencipta	1.561.540.916	1.219.408.586
Unclaimed	1.454.666.358	-
Anugrah Royalti Dangdut Indonesia	560.729.231	561.537.291
Karya Cipta Indonesia	81.138.957	-
Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia	-	86.761.011
Jumlah kewajiban kepada pemilik hak	21.907.702.896	23.216.228.606

8. UTANG LAIN-LAIN

	2019	2018
Hak yang belum di tentukan (<i>Unidentified</i>)	7.951.174.818	3.656.681.926
Hak pencipta	1.328.687.258	1.328.687.258
PT Royalti Anugrah Indonesia	215.251.465	215.251.465
PT Wahana Musik Indonesia	150.000.000	150.000.000
PT AS Industri Rekaman Indonesia	150.000.000	150.000.000
Karyawan	6.737.160	6.737.160
Lain-lain	189.596.120	190.937.121
Jumlah utang lain-lain	9.991.446.821	5.698.294.930

Utang lain-lain kepada PT Royalti Anugrah Indonesia, PT Wahana Musik Indonesia dan PT AS Industri Rekaman Indonesia, merupakan sisa utang atas pinjaman yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada saat mulai beroperasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Lembaga. Pinjaman tersebut diterima tanpa dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang tetap.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

9. BEBAN AKRUAL

	2019	2018
Jasa profesional	65.000.000	32.500.000
Gaji	33.600.000	430.000.000
Transportasi	7.139.708	-
Jumlah beban akrual	102.739.708	462.500.000

10. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2019	2018
Pajak Pertambahan Nilai	1.832.613.551	389.652.668
Jumlah pajak dibayar dimuka	1.832.613.551	389.652.668

b. Utang pajak

	2019	2018
Pajak Penghasilan Pasal 21	135.809.885	139.873.750
Pajak Penghasilan Pasal 29	48.221.023	-
Pajak Pertambahan Nilai atas Surat Tagihan Pajak	-	40.124.157
Jumlah utang pajak	184.030.908	179.997.907

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak menurut laporan aktivitas dengan taksiran laba (rugi) menurut pajak adalah sebagai berikut :

	2019	2018
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak menurut laporan aktivitas	1.639.158.372	436.345.724
Perbedaan fiskal terdiri :		
Perbedaan sementara	-	-
Perbedaan tetap		
Pendapatan jasa giro	(544.381.892)	(333.923.503)
Beban pajak	516.515.859	289.147.697
Biaya lainnya	112.928.685	32.860.386
Jumlah perbedaan fiskal	65.082.452	(11.915.420)

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

	2019	2018
Taksiran penghasilan neto - fiskal	1.724.240.824	424.430.304
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	(1.407.238.784)	(1.831.669.087)
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	317.002.000	(1.407.238.000)
Taksiran pajak penghasilan	53.852.979	-
Dikurang pajak dibayar dimuka. Pajak penghasilan pasal 23	6.631.855	-
Utang pajak penghasilan pasal 29	48.221.023	-

11. PENDAPATAN

	2019	2018
Jasa manajemen royalti:		
Karaoke	3.777.341.082	579.301.714
Digital	1.852.733.488	1.068.677.553
Televisi	665.402.246	466.892.116
Mall	560.016.910	221.802.618
Hotel	417.533.333	138.600.000
Restoran	164.161.000	26.151.000
Executive	34.740.000	194.503.125
Diskotik	10.804.000	1.204.000
Rekreasi	4.422.600	1.501.800
Transportasi	1.012.500	337.500
Radio	400.001	-
Pameran	300.000	-
Hak Terkait	-	891.735.000
General	-	24.087.319
Brokop	-	12.240.000
Toko	-	73.625
Jumlah pendapatan	7.468.987.140	3.627.407.370

Pada tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, pada pasal 18 dijelaskan bahwa LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah kesekuruhan Royalti yang dikumpulkan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

	2019	2018
Taksiran penghasilan neto - fiskal	1.724.240.824	424.430.304
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	(1.407.238.784)	(1.831.669.087)
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	317.002.000	(1.407.238.000)
Taksiran pajak penghasilan	53.852.979	-
Dikurangi pajak dibayar dimuka: Pajak penghasilan pasal 23	5.631.956	-
Utang pajak penghasilan pasal 29	48.221.023	-

11. PENDAPATAN

	2019	2018
Jasa manajemen royalti		
Karaoke	3.777.341.082	579.301.714
Digital	1.852.733.468	1.068.677.553
Televisi	665.402.246	466.892.116
Mal	580.018.910	221.802.618
Hotel	417.533.333	138.600.000
Restoran	164.161.000	26.151.000
Executive	34.740.000	194.503.125
Diskotik	10.904.000	1.204.000
Rekreasi	4.422.600	1.801.800
Transportasi	1.012.500	337.500
Radio	400.001	-
Pameran	300.000	-
Hak Terkait:		891.735.000
General	-	24.087.319
Biioskop	-	12.240.000
Toko	-	73.625
Jumlah pendapatan	7.488.967.140	3.627.407.370

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan proses pengelolaan royalti oleh LMKN yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2 OT.03 01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan penarikan pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu dan musik dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2 OT.03 01-01 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan Pengumpulan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan Musik, huruf H angka 1, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menerima maksimal 5% dari keseluruhan royalti terkumpul untuk biaya operasional

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

11. PENDAPATAN (Lanjutan)

Pada tahun 2018 Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan proses pengelolaan royalti oleh LMKN yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan penarikan, pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu dan musik dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Pengumpulan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan Musik, huruf H angka 1, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menerima maksimal 5% dari keseluruhan royalti terhimpun untuk biaya operasional.

12. BIAYA OPERASIONAL

	2019	2018
Gaji dan tunjangan	3.137.836.002	1.731.313.420
Perjalanan dinas	532.313.135	-
Lisensi	399.411.150	-
Pajak	409.727.025	289.147.697
Transportasi	338.527.241	164.155.900
Jasa profesional	238.900.000	560.243.750
Gewa	188.223.360	-
Sosialisasi dan pelatihan	155.419.200	-
Rumah tangga kantor	111.184.721	33.894.621
Pengiriman dokumen	48.088.000	-
Keperluan kantor dan ATK	46.590.404	14.004.291
Perangkat lunak	36.605.500	-
Perbaikan dan pemeliharaan	22.091.100	-
BPJS	21.459.620	-
Entertain dan jamuan	21.106.069	-
Penyusutan	3.865.685	452.796
Operasional komisioner lama	-	626.000.000
Lain-lain	413.000	1.887.500
Jumlah beban operasional	6.711.661.212	3.441.100.175

13. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir adalah tanggung jawab Komisiner LMKN dan telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 23 Apr 2021

